PENGARUH PENAMBAHAN WAJIB PAJAK BADAN DAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERJADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung Periode 2011-2015)

THE INFLUENCE OF ADDED TAXPAYER CORPORATE AND PUBLISHED TAX COLLECTION LETTERS TO CORPORATE INCOME TAX REVENUE

(Case Study At Tax Office Pratama Bojonagara Bandung Period 2011-2015)

Oleh:
Bagja Aditya Nugraha Putra
Siti Kurnia Rahayu
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
bagjaanp@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon occurring in the Bojonagara Tax Office is the increase of new corporate taxpayer in KPP Bojonagara Bandung is not accompanied by significant corporate income tax revenue, and the phenomenon that occurred in the KPP Pratama Bojonagara Bandung regarding the issuance of Tax Collection Letters is still the existence of taxpayers who still do not pay Tax arrears charged through the Tax Collection Letter, which impedes the receipt of the Corporate Income Tax.

The purpose of this study is to determine the effect of the addition of corporate taxpayers, and the issuance of tax letters against the receipt of corporate income tax.

This research uses descriptive and verification method with multiple linear regression as analytical technique with the help of SPSS program version 16.0. The population in this study is the report of the number of corporate taxpayers, the report of tax collection letters, and Income Tax Income Report Agency, and Samples used in this study is saturated samples. Data source in this research is secondary data from KPP Pratama Bojonagara Bandung period 2011-2015.

The results showed that the addition of corporate taxpayers, and the issuance of tax bills have an effect on corporate income tax receipts. While the addition of corporate taxpayers and the issuance of tax bills has an effect on corporate income tax receipts.

Keywords: Acceptance of corporate income tax, addition of corporate taxpayer, publication of tax bill.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi Pembangunan Negara, tanpa adanya pajak kehidupan di suatu negara tidak akan berjalan dengan baik (Muhammad Iqbal, 2015). Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak (Muhammad Iqbal, 2015). Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Muhammad Iqbal, 2015). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:22), Pajak adalah: “Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor praktikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Sejak tahun 1983 sistem pemungut-an pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system.* Pada *self assessment system*, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk memperhitungkan, menghitung, membayar/ menyetor, serta melaporkan besaran pajak terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sedangkan peran Ditjen Pajak adalah membina, melayani, serta melakukan pengawasan pajak. Menurut Suhendra (2010) perubahan sistem perpajakan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pem-bangunan dengan menyederhanakan administrasi di bidang perpajakan. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak.

Pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak bukanlah tanpa resiko. Dalam sistem ini juga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, untuk itu diperlukan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Ismawan (2000) menyatakan bahwa lemahnya sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment* ini masih menjadi kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak karena wajib pajak dianggap cukup jujur untuk mengungkapkan nilai objek pajak dan nilai tagihan pajak dalam Surat Pemberitahu-an (SPT) secara transparan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian fenomena pada Latar Belakang Penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1) Penerimaan pajak masih belum mencapai target.
2) Penambahan wajib pajak badan yang tidak diiringi dengan penerimaan pajak penghasilan badan.
3) Masih adanya wajib pajak yang tidak membayar setelah diberikannya surat tagihan pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah dan paparan Latar Belakang Penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh peningkatan Penambahan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2) Seberapa besar pengaruh Realisasi Penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Penigkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sebuah pernyataan prediksi yang menghubungkan *independent variable* terhadap *dependent* (Kothari, 2008). Yaitu untuk dapat mengetahui kebenaran adanya pengaruh Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan Meningkatkan Penambahan Wajib Pajak Badan, dan Realisasi Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Studi Kasus Pada KPP Bojonagara.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisa :

1) Besarnya pengaruh peningkatan penambahan wajib pajak badan terhadap pengingkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

2) Besarnya pengaruh realisasi penerbitan surat tagihan pajak terhadap pengingkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut (Uma Sekaran, 2006:10). Dari penjelasan diatas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang terjadi terkait Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan Meningkatkan Penambahan Wajib Pajak Badan, dan Realisasi Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Studi Kasus Pada KPP Bojonagara.

1.5.2. Kegunaan Akademis

Kegunaan hasil penelitian ini adalah kelanjutan dari tujuan penelitian. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, ia dapat diharapkan menyumbangkan hasil itu kepada bidang yang diteliti, pembicaraan tentang kegunaan penelitian ini dapat menjadi penting setelah beberapa penelitian tidak dapat mengatakan sebenarnya hasil apa yang diharapkan, dan sejauh mana sumbangannya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. (Suharsimi Arikunto, 2006:99).

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dan konsep-konsep yang telah diharapkan bisa berguna, seperti:

1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung teori terkait Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan Meningkatkan Penambahan Wajib Pajak Badan, dan Realisasi Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Studi Kasus Pada KPP Bojonagara.
2) Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan agar penulis bisa menerapkan teori, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman mengenai Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan Meningkatkan Penambahan Wajib Pajak Badan, dan Realisasi Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Studi Kasus Pada KPP Bojonagara.
3) Bagi Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap pengembangan atau pembuatan penelitian yang sama.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Wajib Pajak Badan

Menurut KUP Pasal 1 angka 2 dalam Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:74) Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2011:75) Wajib Pajak adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Menurut Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati (2015:280). Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap".

Peneliti menggunakan jumlah wajib pajak sebagai indikator dari wajib pajak sesuai dengan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

2.1.2. Surat Tagihan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017:296) mengungapkan, Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh DJP untuk melakukan tindakan penagihan utang dan atau sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda.

Menurut Djoko Muljono (2010:86) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adminsitrasi berupa bunga dan/atau denda.

Indikator surat tagihan pajak dapat diukur dari jumlah pajak terutang yang didasarkan atas penerbitan surat tagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara.

2.1.3. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Juli Ratnawati (2015:269) mengungkapkan, Pajak Penghasilan Badan adalah PPh Badan adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia.

Menurut Siti Resmi (2011:74) yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Indikator penerimaan pajak penghasilan adalah hasil-hasil penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untuk melihat jumlah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Nufransa Wira Sakti (2014:162) menyatakan bahwa potensi penerimaan pajak juga banyak terdapat pada usaha perorangan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Yang berarti jika ada Wajib Pajak baru yang terdaftar (bertambah) maka penerimaan pajak akan bertambah pula.

Restu Dwiastika Putra dan Dini Wahjor Hapsari (2015) mengemukakan bahwa banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatakan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Setiap terjadi penambahan jumlah wajib pajak badan maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak penghasilan badan yang signifikan.

Sedangkan Yesi Arisandi dalam penelitiannya (2015) mengemukakan bahwa Penambahan Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Semakin banyak wajib pajak baru yang terdaftar juga berstatus sebagai wajib pajak efektif maka akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.

2.2.2. Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Djoko Muljono (2010:136) Surat Tagihan Pajak adalah Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanski administrasi berupa bunga/denda.

Djoko Muljono (2010:273) mengemukakan bahwa STP dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui pemeriksaan ataupun peneilitian, pada PPh, PPN, dan PPnBM. Dengan dilakukannya penagihan melalui Penerbitan STP maka Penerimaan Pajak Penghasilan akan bertambah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2011) menyatakan bahwa Penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini disebabkan penagihan atas penerbitan surat tagihan pakal dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Wajib pajak tidak dapat menghindar dari sanksi yang tertera dalam surat tagihan pajak. Sehingga petugas pajak akan terus memburu wajib pajak untuk memenuhi surat tagihan pajak tersebut.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_1 **:** Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

H_2 **:** Penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun pengeritan metode deskriptif menurut Sugiyono (2014:21) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Sugiyono (2014:8) Metode Verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan**.**

3.2. Operasionalisasi Variabel

Thomas *et al.* (2010) dalam I Ketut Swarjana (2015:49) menyatakan Operasionaliasi Variabel adalah fenomena observasional yang memungkinkan peneliti untuk mengujinya secara *empiric*, apakalah *outcome* yang diprediksi tersebut benar atau salah.

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:31), operasionalisasi variabel didefinisikan sebagai proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Sumber Data

Sugiyono (2014:137) menyatakan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013:224) menyatakan Teknik pengumpulan data adalah Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan *(Field Research)* dan Penelitian Kepusatakaan.

3.4. POPULASI, SAMPEL, DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENELITIAN

3.4.1. Populasi

Sugiyono (2014:117) menyatakan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Laporan Jumlah Wajib Pajak Badan, Laporan Surat Tagihan Pajak, dan Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, pada KPP Pratama Bojonagara dari Tahun 2011 – Tahun 2015. Alasan tahun tersebut yang menjadi populasi sasaran penelitian ini adalah adanya daluarsa pajak selama 5 tahun, sehingga data yang dapat diperoleh peneliti hanya untuk jangka waktu 5 tahun.

3.4.2. Sampel

Asni Harianti dkk (2012:13) menyatakan Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel jenuh sebagai sampel dalam penelitian yang dilakukan, dikarenakan jumlah populasi yang relatif kecil.

Adapun definisi Sampling Jenuh (Sensus) yang dikemukakan oleh Ninit Alfiantika (2106:108) adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

3.4.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Bojonagara yang beralamat di Jl. Insinyur Sutami No.1, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat (40152).

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Maret sampai dengan Agustus 2017.

3.5. Metode Pengujian Data

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah rasio, maka metode pengujian yang data yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik.

Ansofino (2012:93) mengungkapkan Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regeresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS).

3.6. Metode Analisis Data

Menurut Umi Narimawati, dkk (2010:41), pengertian metode analisis adalah Metode analisis adalah proses mencari sebuah proses dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif.

3.6.1. Analisis Data Metode Deskriptif

Sugiyono (2014:14) mendefinisikan metode deskriptif sebagai berikut: Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Penambahan Wajib Pajak Badan, Penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

3.6.2. Analisis Data Metode Verifikatif

Menurut Sugiyono (2014:31) mendefinisikan analisis kuantiatif sebagai berikut: Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan parametis dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametis dan statistik non parametis. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara *random*. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan *pictogram*. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan.

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Andi Supangat (2007:352) menyatakan garis regresi (*regression line/line of the best fit/estimating line*) adalah, “Suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter* diagram) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya)”.

3.6.4. Analisis Korelasi Pearson

Sudjana (1989:152) dalam Umi Narimawati (2011:49) menyatakan pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y, dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi *Pearson*.

3.6.5. Analisis Koefisien Determinasi Parsial

Digunakan untuk melihat sebarapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

3.7. Uji Hipotesis

Menurut Andi Supangat (2007:293), yang dimaksud dengan pengujian hipotesis adalah Salah satu cara dalam statistika untuk menguji “parameter” populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan kesimpulan sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya”.

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh penambahan wajib pajak badan dan penerbitan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi, dalam analisisnya menggunakan pengujian secara parsial.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Analisi Deskriptif

4.1.1.1. Hasil Analisis Deskriptif Tentang Penambahan Wajib Pajak Badan

Tabel 4.1 memberikan informasi bahwa penambahan wajib pajak terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, mengingat pentingnya pajak maka dengan adanya wajib pajak baru yang terdaftar penerimaan pajak akan mengingkat.

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahawa Rata-rata Penambahan wajib pajak badan dari tahun 2011 – 2015 cenderung mengalami peningkatan sebesar 4% - 9% pertahun, pada kantor pelayanan pajak pratama bojonagara periode 2011 – 2015.

4.1.1.2. Hasil Analsis Deskriptif Tentang Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Tabel 4.3 memberikan informasi jumlah pencairan pajak melalui surat tagihan pajak yang mendekati tunggakan pajak yang ada yaitu pada tahun 2013 yaitu dengan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 5.717.907.30**9**, dari jumlah tunggakan sebesar Rp. 7.035.273.768, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut banyaknya wajib pajak yang sudah membayar tunggakan pajaknya beserta denda yang sudah ditentukan, dan jumlah pencairan pajak melalui surat tagihan pajak yang paling jauh dari jumlah tunggakan pajak yang ada yaitu pada tahun 2014 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 3.425.502.645 dari jumlah tunggakan pajak yang ada yaitu sebesar Rp. 16.873.655.896, hal ini disebabkan pada tahun tersebut banyaknya wajib pajak yang masih tidak mau membayar tunggakan pajaknya setelah diterbitkannya surat tagihan pajak.

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bhawa Rata-rata surat Tagihan Pajak dari tahun 2011 – 2015 cenderung fluktuatif naik turun, pada tahun 2012 Surat Tagihan Pajak mengalami peningkatan sebesar 61%, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 surat tagihan pajak mengalami penurunan sebesar 37% - 40 % pertahun akan tetapi pada tahun 2015 surat tagihan pajak mengalmi peningkatan sebesar 228% pertahun, pada kantor pelayanan pajak pratama bojonagara periode 2011 – 2015.

4.1.1.3. Hasil Analisis Deskriptif Tentang Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tabel 4.5 memberikan informasi penerimaan pajak penghasilan badan yang mendekati target ada pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 24.931.830.446 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 25.978.891.699 hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada tahun tersebut, dan jumlah penerimaan pajak penghasilan yang jauh dari target ada pada tahun 2012 dengan nilai jumlah pajak penghasilan yang terrealisasi sebesar Rp. 17.609.101.407 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 36.824.306.008 hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya pada tahun tersebut.

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahawa Rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari tahun 2011 – 2015 cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2012 penerimaan pajak (PPh) badan mengalmi penurunan sebesar 18% pertahun, akan tetapi dari tahu 2013 sampai 2015 penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan mengalami peningkatan sebesar 24% hingga 64 % pertahun, pada kantor pelayanan pajak pratama bojonagara periode 2011 – 2015.

4.1.2. Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Dari tabel 4.7 dapat dilihat nilai signifikansi *(Asymp. Sig. (2-tailed))* dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,672 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* pada gambar 4.5 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

c) Uji Multikoleniaritas

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat nilai *tolerance* yang diperoleh untuk kedua variabel bebas adalah sebesar 0,878 > 0,10 dengan nilai *VIF* sebesar 1,138 < 10. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel bebas dalam model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas, maka model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

d) Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabe 4.9 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.990 Karena nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < 1.990 < +2, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan seluruh hasil pengujian yang telah dilakukan di atas, maka disimpulkan data dalam penelitian ini tidak diperoleh pelanggaran terhadap asumsi regresi.

4.1.2.2. Analisis Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan dan Surat Tagihan Pajak Terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara periode 2011-2015

A. Persamaan Regresi (*Multiple Regresion*)

Berdasarkan tabel 4.10 yang diperoleh dari pengolahan melalui *software* SPSS

a) Konstanta sebesar 1.924E9; artinya jika pertambahan Wajib Pajak Badan dan Surat Tagihan Pajak nilainya adalah 0, maka penerimaan pajak penghasilan Badan adalah 1.924E9 atau sama dengan 0,019249.
b) Koefisien regresi variabel Pertambahan wajib Pajak Badan (X_1) sebesar 1.263E6; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pertambahan wajib Pajak Badan mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak penghasilan Badan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1.263E6 atau sama dengan 0,012636. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pertambahan wajib Pajak Badan dengan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan , semakin tinggi Pertambahan wajib Pajak Badan maka penerimaan pajak penghasilan Badan akan semakin tinggi.
c) Koefisien regresi variabel Surat Tagihan Pajak (X_2) sebesar 1.525 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah wajib pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak penghasilan Badan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1.525. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Surat Tagihan Pajak dengan penerimaan pajak penghasilan Badan,

semakin tinggi Surat Tagihan Pajak maka penerimaan pajak penghasilan badan akan semakin tinggi.

B. Analisis Korelasi

Dari tabel 4.12 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Hubungan antara Pertambahan wajib Pajak Badan dengan penerimaan pajak penghasilan badan

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Pertambahan wajib Pajak Badan dengan penerimaan pajak penghasilan badanadalah sebesar 0,605. Jika diinterprestasikan menurut kriteria dalam Syahri Alhusin (2003:157) maka korelasi Pertambahan wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan memiliki hubungan yang cukup tinggi. Nilai korelasi bertanda posistif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin tinggi Pertambahan wajib Pajak Badan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan Badan.

- Hubungan antara Surat Tagihan Pajak dengan penerimaan pajak penghasilan Badan

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh Surat Tagihan Pajak dengan penerimaan pajak penghasilan pajak adalah sebesar 0.551. Jika diinterprestasikan menurut kriteria dalam Syahri Alhusin (2003:157)) maka korelasi Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan memiliki hubungan yang sedang. Nilai korelasi bertanda posistif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin tinggi Surat Tagihan Pajak, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan Badan.

C. Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.12 maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel pertumbuhan wajib pajak Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan sebagai berikut:

$Kd = (0,601)^2 \times 100\%$

$= 36.12\%$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel pertambahan wajib pajak Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan yaitu sebesar 36.12%, sedangkan sisanya sebesar 63.88% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti, Surat Paksa, pemeriksaan pajak , pertumbuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan tabel 4.12 maka diperoleh determinasi parsial dari variabel Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan sebagai berikut:

$Kd = (0,551)^2 \times 100\%$

$= 30.36\%$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasailan Badan yaitu sebesar 30.36%, sedangkan sisanya sebesar 69.64% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.1.3. Pengujian Hipotesis

4.1.3.1. Pengujian Hipotesis pertambahan Wajib Pajak Terhadap penerimaan pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel pertambahan Wajib Pajak Badan sebesar 3.130. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1= 20-2-1=17, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 1.740. Diketahui bahwa t_{hitung} untuk X_1 sebesar 3.130 > nilai t_{tabel} 1.740, maka H_0 ditolak artinya variabel penambahan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

4.1.3.2. Pengujian Hipotesis Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel Surat Tagihan Pajak sebesar 2.722. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1= 20-2-1=17, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 1.740. Diketahui bahwa t_{hitung} untuk X_1 sebesar 2.722 > nilai t_{tabel} 1.740, maka H_0 ditolak artinya variabel Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Penghasilan Pajak.

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1. Hasil Prediksi Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel 4.15 didapat prediksi penerimaan pajak penghasilan badan 5 tahun kedepan yang akan datang berdasarkan rumus persamaan yang diperoleh dari hasil *output* SPSS yang telah dilakukan yaitu Y = 1.924E9+ 1.263E6 (X_1) + 1.525 (X_2), maka tahun prediksi pertama akan dimulai tahun 2016 karena tahun penelitian terakhir pada tahun 2015. Pada tahun prediksi pertama yaitu pada tahun 2016 prediksi rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan per tahun akan meningkat sebesar Rp. 7.348.104.268, lalu pada tahun kedua yaitu tahun 2017, prediksi rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 7.745.658.872, mengalami pengingkatan sebesar Rp. 397.554.604 dari prediksi tahun 2016, pada tahun 2018 prediksi rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 8.414.335.576, mengalami peningkatan sebesar Rp. 668.676.704 dari prediksi tahun 2017, pada tahun 2019 prediksi rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 8.850.611.169, mengalami peningkatan sebesar Rp. 436.275.593 dari prediksi tahun 2018, pada tahun 2020 prediksi rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 9.050.054.865, mengalami peningkatan sebesar Rp. 199.443.696 dari prediksi tahun 2019. Dengan demikian berdasarkan rumus yang diperolah penerimaan pajak penghasilan badan akan terus bertambah setiap tahunnya dikarenakan nilai rata-rata pertahun dari penerimaan pajak penghasilan badan terus bertambah dari tahun-tahun sebelumnya.

4.2.2. Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai korelasi antara Penambahan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu sebesar 0.605 yang tergolong dalam kategori hubungan yang cukup Tinggi . Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,61 hingga 0.80 yang tergolong dalam kategori cukup tinggi dan hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Penambahan Wajib Pajak Badan maka hal tersebut akan menaikan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan sebaliknya ketika Penambahan Wajib Pajak Badan menurun maka jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan mengalami penurunan.

4.2.3. Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai korelasi antara Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu sebesar 0.551 yang tergolong dalam kategori hubungan yang cukup Tinggi . Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,41 hingga 0.60 yang tergolong dalam kategori sedang dan hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaiakan Surat Tagihan Pajak maka hal tersebut akan menaikan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan sebaliknya ketika Surat Tagihan Pajak menurun maka jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan mengalami penurunan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah, kerangka pikir, hipotesis penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pertambahan wajib pajak badan dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara periode 2011-2015, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penambahan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara, banyaknya penambahan wajib pajak setiap tahun yg bedampak kepada penerimanaan pajak penghasilan badan, dimana ketika wajib pajak badan meningkat maka penerimaan pajak penghasilan badan akan ikut meningkat, begitupun sebaliknya ketika pertambahan wajib pajak badan menurun maka penerimaan pajak penghasilan badan pun akan ikut menurun, namun fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bojonagara yaitu wajib pajak bertambah tetapi tidak diiringi dengan penambahan penerimaan pajak penghasilan yang signifikan (belum sesuai target) dikarenakan masih ada beberapa wajib pajaknya yang masih belum melakukan kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPTnya.

2. Surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara, setiap kenaikkan tunggakan pajak maka akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, dimana ketika jumlah surat tagihan pajak meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan badan akan ikut meningkat, begitupun sebaliknya ketika Surat Tagihan Pajak menurun maka penerimaan pajak penghasilan badan pun akan ikut menurun namun fenomena yang terjadi di KPP Pratama Bojonagara, dimana jumlah pajak terutang yang didasarkan pada surat tagihan pajak yang diterima masih belum mempengaruhi penerimaan PPh Badan secara signifikan, dikarenakan tidak seluruhnya terrealisasi, hal ini disebabkan karena masih ada wajib pajaknya yang tetap tidak membayar atau melakukan kewajiban perpajakannya setelah diberikannya surat tagihan pajak.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Praktis

Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak adalah berupa denda, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Instansi sebagai berikut:

1) Sebaiknya KPP melalakukan kegiatan sosialisasi kepada orang yang belum menjadi wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara dan untuk kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan minat wajib pajak agar mau melakukan kewajiban perpajakannya.
2) Sebaiknya KPP melakukan sanksi lebih kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya setelah diterbitkannya surat tagihan pajak.

5.2.2. Saran Akademis

1) Bagi Pengembang Ilmu
   Disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama yaitu deskriptif dan verifikatif tetapi unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori perpajakan dan konsep yang diterima secara umum.

2) Bagi Peneliti Lain
Diharapkan agar para peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa penerimaan pajak penghasilan badan dipengaruhi oleh pertambahan wajib pajak badan dan surat tagihan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. *2007*. *Statistika dalam Kajian Deskriftif, Inferensi dan. Nonparametrik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Asni Harianti, Dini Iskandar dkk. 2012. *Statistika 1*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Djoko Muljono, 2010. Hukum *Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV. Andi.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2011. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

I Ketut Swarjana, 2015. *Metode Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: CV. Andi.

Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-dasar Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Ninit Alfianika, 2016. *Metode Penelitian Pengajaran*. Yogyakarta: Deepublish.

Nurfransa Wira Sakti, 2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. Jakarta: Redaksi.

Restu Dwiastika Putra dan Dini Wajor Hapsari, 2015. *Jurnal Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 25* (Studi Kasus pada KPP Pratama Yogyakarta Periode Tahun 2010-2012).

Siti Kurnia Rahayu, 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal).* Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Resmi, 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2013. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Titin Vegirawati, 2011. *Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang.*

Umi Narimawati, 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Genesis.

Umi, *Narimawati*., Sri Dewi, Anggadini., Linna, Ismawati, *2011*. *Penulisan. Karya Ilmiah, Edisi Pertama.* Bekasi: Genesis.

Yessi Arisandi, 2015. *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT masa PPh Badan, Penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Badan*.

LAMPIRAN

Tabel 4.1
Rata-rata Penambahan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Periode 2011-2015

No	Periode	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Maret	956	1.253	630	755	774
2	Juni	5.032	4.760	6.522	6.570	2.541
3	September	830	1.145	775	983	870
4	Desember	870	1.211	874	875	5.432
5	Jumlah	**7.688**	**8.369**	**8.801**	**9.183**	**9.617**
Minimum		830	1.145	630	755	774
Maximum		5.032	4.760	6.522	6.570	5.432
Rata -Rata		1.922	2.092	2.200	2.296	2.404

Sumber :Kpp Pratama Bojonagara / data diolah 2017

Tabel 4.2
Perkembangan Rata-rata Penambahan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Wajib Pajak Badan	1.922	2.092	2.200	2.296	2.404
Perkembangan		9%	5%	4%	5%

Tabel 4.3
Rata-rata Penerbitan Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Periode 2011-2015

No	Periode	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Maret	999.534.822	2.204.680.988	642.457.258	444.950.334	658.680.955
2	Juni	2.698.379.045	4.344.720.709	3.394.776.699	1.675.889.310	3.350.443.650
3	September	955.890.323	1.125.877.966	785.766.239	644.340.321	942.540.776
4	Desember	938.986.074	1.332.581.125	894.907.113	660.322.680	6.280.785.601
5	Jumlah	**5.592.790.264**	**9.007.860.788**	**5.717.907.309**	**3.425.502.645**	**11.232.450.982**
Jumlah Tunggakan		**10.191.028.527**	**12.434.730.609**	**7.035.273.768**	**16.873.655.896**	**21.429.418.565**
Minimum		938.986.074	1.125.877.966	642.457.258	444.950.334	658.680.955
Maximum		2.698.379.045	4.344.720.709	3.394.776.699	1.675.889.310	6.280.785.601
Rata -Rata		1.398.197.566	2.251.965.197	1.429.476.827	856.375.661	2.808.112.746

Sumber :Kpp Pratama Bojonagara / data diolah 2017

Tabel 4.4
Perkembangan Rata-rata Penerbitan Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Surat Tagihan Pajak	1.398.197.566	2.251.965.197	1.429.476.827	856.375.661	2.808.112.746
Perkembangan		61%	-37%	-40%	228%

Tabel 4.5
Rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Periode 2011-2015

No	Periode	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Maret	4.509.743.585	4.014.678.325	3.880.791.046	3.288.116.486	5.475.634.227
2	Juni	8.676.301.085	7.361.478.331	12.476.234.214	17.200.533.044	17.506.371.448
3	September	4.111.049.574	3.058.992.546	4.260.969.011	5.333.657.799	8.047.416.504
4	Desember	4.144.230.739	3.173.952.205	4.313.836.175	5.591.248.422	20.536.835.585
5	Jumlah	**21.441.324.983**	**17.609.101.407**	**24.931.830.446**	**31.413.555.751**	**51.566.257.764**
Target		**28.723.230.760**	**36.824.306.008**	**25.978.891.699**	**38.504.907.974**	**61.011.462.299**
Minimum		4.111.049.574	3.058.992.546	3.880.791.046	3.288.116.486	5.475.634.227
Maximum		8.676.301.085	7.361.478.331	12.476.234.214	17.200.533.044	20.536.835.585
Rata -Rata		5.360.331.246	4.402.275.352	6.232.957.612	7.853.388.938	12.891.564.441

Sumber :Kpp Pratama Bojonagara / data diolah 2017

Tabel 4.6
Perkembangan Rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara

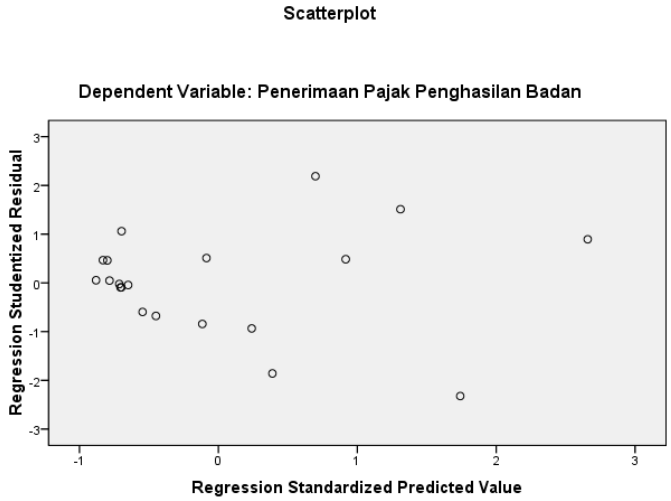
Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Badan	5.360.331.246	4.402.275.352	6.232.957.612	7.853.388.938	12.891.564.441
Perkembangan		- 18%	42%	26%	64%

Tabel 4.7
Uji *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters[a]	Mean	-.0000005
	Std. Deviation	3.32722613E9
Most Extreme Differences	Absolute	.162
	Positive	.107
	Negative	-.162
Kolmogorov-Smirnov Z		.724
Asymp. Sig. (2-tailed)		.672

a. Test distribution is Normal.



Gambar 4.5
Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.8
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pertambahan Wajib Pajak Badan	.878	1.138
	Surat Tagihan Pajak	.878	1.138

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak_Penghasilan Badan

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.780[a]	.608	.562	3.518E9	1.990

a. Predictors: (Constant), Surat Tagihan Pajak, Pertambahan Wajib Pajak Badan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tabel 4.10
Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.924E9	1.324E9		1.453	.164		
	Pertambahan Wajib Pajak Badan	1.263E6	403593.726	.507	3.130	.006	.878	1.138
	Surat Tagihan Pajak	1.525	.560	.441	2.722	.014	.878	1.138

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tabel 4.12
Koefisien Korelasi Parsial

Correlations

		Penerimaan Pajak
Pertambahan Wajib Pajak Badan	Pearson Correlation	.605**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	60
Surat Tagihan Pajak	Pearson Correlation	.551**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	60

**. Correlation is significant (2-tailed).

Tabel 4.13
Koefisien Uji Hipotesis Penambahan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan PPh Badan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.924E9	1.324E9		1.453	.164		
	Pertambahan Wajib Pajak Badan	1.263E6	403593.726	.507	3.130	.006	.878	1.138
	Surat Tagihan Pajak	1.525	.560	.441	2.722	.014	.878	1.138

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tabel 4.14
Koefisien Uji Hipotesis Surat Tagihan Pajak Terhadap penerimaan pajak Penghasilan Badan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.924E9	1.324E9		1.453	.164		
	Pertambahan Wajib Pajak Badan	1.263E6	403593.726	.507	3.130	.006	.878	1.138
	Surat Tagihan Pajak	1.525	.560	.441	2.722	.014	.878	1.138

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tabel 4.15
Prediksi Rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 5 Tahun Yang Akan Datang

$\hat{Y} = 0.019249 + 0.012636 (X_1) + 1.525 (X_2)$			Rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Tahun	**0.012636 (X_1)**	**1.525 (X_2)**	
2016	2.183	Rp. 1.748.825.599	Rp. 7.348.104.268
2017	2.235	Rp. 1.818.951.206	Rp. 7.745.658.872
2018	2.264	Rp. 1.732.348.408	Rp. 8.414.335.576
2019	2.276	Rp. 1.792.922.724	Rp. 8.850.611.169
2020	2.272	Rp. 1.980.232.137	RP. 9.050.054.865